



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SIARAN PERS

KPK Dukung Peluncuran e-Announcement Bappenas dan Depkominfo

Jakarta, 5 Januari 2007. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) meluncurkan aplikasi pengumuman pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Announcement). Tujuan diluncurkannya aplikasi e-Announcement adalah meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh dua instansi pemerintah tersebut.

Peluncuran e-Announcement dilaksanakan di kantor KPK Jl. Veteran III Jakarta, pada Jumat, 5 Januari 2007. Dalam acara ini hadir Pimpinan KPK, Meneg PPN Paskah Suzetta, Menkominfo Sofyan Djalil, pejabat dari instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang telah melaksanakan dan akan melaksanakan e-Announcement serta beberapa lembaga donor.

e-Announcement merupakan perangkat aplikasi *on-line* yang menyediakan informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan semua instansi pemerintah. Secara garis besar, aplikasi ini menampilkan tiga pengumuman:

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- Rencana Paket Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (berserta nilainya dalam satu tahun anggaran) dari setiap instansi pemerintah, pusat maupun daerah, di awal tahun anggaran;

- Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan Penyedia Barang dan Jasa melalui prosedur pelelangan (pengumuman lelang, pengumuman lulus prakualifikasi, pengumuman perusahaan peserta pengadaan, pengumuman perusahaan lulus teknis untuk konsultan, dan pengumuman pemenang pengadaan).

Peluncuran e-Announcement sejalan dengan penilaian KPK terhadap perlunya perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil kajian yang dilakukan Direktorat Monitor KPK terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah didapat kesimpulan bahwa sebagian besar potensi penyimpangan disebabkan karena minimnya transparansi.

Peningkatan transparansi inilah yang menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi diharapkan dapat menekan peluang korupsi dan penyimpangan lainnya, meminimalisir praktik diskriminatif, meningkatkan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan kualitas pengawasan oleh berbagai pihak yang berwenang.

“Semoga dengan adanya e-Announcement ini pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih transparan, terbuka, dan adil (*fair*) sehingga patutlah kita semua menaruh harapan yang besar dalam upaya mengurangi tingkat kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah”, ujar Sofyan Djalil.

Laporan Country Procurement Assessment Report (CPAR) tahun 2001 menyebutkan, pengadaan barang dan jasa pemerintah menghabiskan dana sekitar 60% dari belanja negara. Dari jumlah itu 10%-50% diperkirakan bocor. Sememntara itu, data KPK menunjukkan, lebih dari 75 persen kasus-kasus yang ditangani KPK merupakan kasus korupsi yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam pengoperasian dan penerapannya, e-Announcement dikelola oleh Bappenas. Sedang dukungan teknis dan supervisi dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Untuk alamat situsnya, masyarakat bisa mengakses secara langsung melalui www.pengadaannasional-bappenas.go.id.

Pada tahun 2006 --setelah dilakukan bimbingan teknis-- terdapat 30 Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah (11 Instansi Pemerintah Pusat, 9 Pemerintah Provinsi dan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota) yang bersemangat menjadi *volunteer* dan *pioneer* dalam menerapkan e-Announcement.